

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

LKPD

PENDIDIKAN PANCASILA

“Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan
Kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia”

Nama anggota kelompok

KELAS

X

Tujuan Pembelajaran



Setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik diharapkan dapat :

1. Menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mengidentifikasi kedudukan dan hubungan antarperaturan berdasarkan hierarki yang berlaku.
2. Menganalisis makna kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Menganalisis keterkaitan antara Pancasila dan tata urutan peraturan perundang-undangan melalui penyelesaian kasus nyata yang menunjukkan adanya konflik atau pertentangan norma hukum



Petunjuk Pengerjaan LKPD

Bacalah setiap studi kasus dengan saksama. Diskusikan bersama kelompokmu, lalu jawablah setiap pertanyaan dengan bahasa sendiri, logis, dan sesuai hasil diskusi kelompok.

Tugas

Studi Kasus 1

Peraturan Daerah yang Bertentangan

Pemerintah Kabupaten A mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pedagang kecil berjualan di trotoar dan jalan utama kota dengan ancaman denda yang cukup besar. Tujuan Perda tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota.

Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini dianggap merugikan pedagang kecil karena tidak disertai penyediaan tempat relokasi yang layak. Banyak pihak menilai Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjamin hak warga negara untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Setelah dilakukan evaluasi, Perda tersebut akhirnya dibatalkan.

Soal :

1. Menurutmu, termasuk dalam jenis peraturan apa Perda tersebut berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Jelaskan alasannya.
3. Peraturan apa saja yang seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan Perda tersebut?
4. Dampak apa yang ditimbulkan dari pemberlakuan Perda tersebut terhadap masyarakat kecil?
5. Menurut kelompokmu, bagaimana seharusnya Perda disusun agar tetap tertib tetapi tidak merugikan masyarakat?

Tugas

Studi kasus 2

Aturan Sekolah dan Nilai Pancasila

Sebuah sekolah membuat aturan yang melarang sebagian siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan alasan perbedaan latar belakang. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban sekolah.

Namun, aturan ini menimbulkan protes karena dianggap tidak adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Setelah dilakukan musyawarah antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua, aturan tersebut akhirnya diperbaiki.

Soal :

1. Menurutmu, apakah aturan sekolah termasuk bentuk peraturan yang harus mencerminkan nilai Pancasila? Jelaskan.
2. Nilai atau sila Pancasila apa yang tidak tercermin dalam aturan tersebut?
3. Mengapa Pancasila harus dijadikan dasar dalam penyusunan aturan, termasuk aturan sekolah?
4. Dampak apa yang dapat terjadi jika aturan dibuat tanpa memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan?
5. Berikan contoh aturan sekolah yang sesuai dengan nilai Pancasila menurut pendapatmu.

Tugas

Studi kasus 3

Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Konflik

Pemerintah Provinsi B menetapkan kebijakan daerah yang membatasi kegiatan masyarakat pada waktu tertentu dengan alasan keamanan. Kebijakan tersebut dibuat tanpa memperhatikan peraturan yang lebih tinggi dan menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap membatasi hak mereka.

Setelah dilakukan kajian, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak mencerminkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, kebijakan tersebut akhirnya dicabut.

Soal :

1. Menurutmu, kebijakan daerah tersebut berada pada tingkat peraturan yang mana dalam tata urutan perundang-undangan?
2. Mengapa suatu kebijakan daerah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi?
3. Nilai Pancasila apa yang dilanggar dalam kebijakan tersebut? Jelaskan alasanmu.
4. Apa dampak yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan tersebut?
5. Bagaimana hubungan antara tata urutan peraturan perundang-undangan dan Pancasila dalam menyelesaikan kasus ini?

JAWABAN

JAWABAN

JAWABAN

JAWABAN